

## PENTINGNYA PERIZINAN DALAM PEMBANGUNAN VILLA

Oleh

Erikson Sihotang

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar

eriksonsihotang@gmail.com

**Abstract,** Bali is a province in Indonesia with unique characteristics that contribute to regional development, where economic pillars are built on the strengths of the tourism sector. Its rich natural and cultural potential supports sustainable tourism development. The extraordinary natural beauty and unique cultural heritage of Bali make it one of the most popular tourist destinations in Indonesia. This view was supported by Tourism Minister Arief Yahya, who stated that Bali is a destination already well-known on the global tourism map. Therefore, Bali is highly deserving of being an icon of Indonesian tourism

**Keywords :** Bali, Villa, Tourism

**Abstrak,** Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dalam meningkatkan pembangunan daerahnya, dimana pilar-pilar ekonomi dibangun melalui keunggulan sektor pariwisata. Potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki mendukung adanya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Keindahan alam yang luar biasa dan keunikan seni budayanya yang menarik menyebabkan Bali menjadi destinasi wisata yang paling populer di Indonesia. hal ini didukung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya yang mengatakan bahwa Bali adalah destinasi yang sudah punya pamor di peta pariwisata dunia. Sehingga Bali sangat layak untuk dijadikan icon pariwisata Indonesia.

Kata Kunci : Bali, Vila, Pariwisata

### PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dalam meningkatkan pembangunan daerahnya, dimana pilar-pilar ekonomi dibangun melalui keunggulan sektor pariwisata. Potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki mendukung adanya pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Keindahan alam yang luar biasa dan keunikan seni budayanya yang menarik menyebabkan Bali menjadi destinasi wisata yang paling populer di Indonesia. hal ini didukung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya yang

mengatakan bahwa Bali adalah destinasi yang sudah punya pamor di peta pariwisata dunia. Sehingga Bali sangat layak untuk dijadikan icon pariwisata Indonesia.

Di dalam perjalannya, pariwisata Bali sempat mengalami guncangan akibat serangan teroris yang terjadi pada tahun 2002 dan 2005, sehingga perekonomian Bali sempat mengalami kelumpuhan. Tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan baik pada wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Beberapa Negara seperti Amerika, Australia, Jepang, dan negara-negara di Eropa mengeluarkan travel warning yang mengakibatkan

banyak wisatawan dilarang untuk datang ke Pulau Bali. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, pemerintah bersama masyarakat melakukan berbagai program pemulihan agar kondisi pariwisata Bali kembali normal. Hasilnya industri pariwisata Bali mengalami tingkat pertumbuhan secara signifikan.

Pulau Bali merupakan salah satu daerah tujuan pariwisata tertinggi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Bali yang sudah terkenal di dunia berkat keindahan panorama dan budayanya. Semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja. Untuk menata kepariwisataan, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan, untuk tingkat nasional pemerintah telah menerbitkan, diantaranya Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 ), sedangkan pada tataran daerah, pemerintah daerah menerbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah , Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan pengaturan kawasan strategis pariwisata, di kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pondok Wisata menentukan beberapa kawasan strategis pariwisata di kota Denpasar, diantaranya Pantai Sanur, Taman Budaya Art Centre dan lainnya.Untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kota Denpasar, para pelaku usaha menyediakan jasa akomodasi wisata yang beragam di Kota Denpasar, mulai

dari guest house, hotel melati, hotel berbintang hingga villa pribadi.

Pentingnya izin usaha pariwisata di Bali adalah untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai hukum, melindungi wisatawan, dan menjaga kelestarian lingkungan serta budaya Bali. Izin usaha juga mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan, promosi, dan kemitraan.

Pentingnya izin usaha pariwisata di Bali yaitu untuk memastikan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga yaitu untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi wisatawan selama berada di Bali.

Dengan adanya izin usaha dan pengawasan yang ketat, diharapkan sektor pariwisata Bali dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta budaya yang menjadi daya tarik utama pulau ini.

Dewasa ini dirasakan bahwa pembangunan villa di Kota Denpasar semakin marak saja, hal ini dapat dilihat dari banyaknya villa-villa bermunculan baik di area Sanur, area Renon hingga area Teuku Umar. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah Kota Denpasar. Untuk mendukung operasional sebuah villa, baik peruntukannya maupun pelayanannya, termasuk juga fasilitas serta untuk mencapai standar pendirian usaha akomodasi, maka di perlukan adanya suatu ijin usaha.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam jurnal ini Adalah apakah yang mendasari Pentingnya Perizinan dalam Pembangunan Villa?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif juga disebut dengan metode penelitian doktriner, karena pada penelitian ini hanya ditujukan kepada pengaturan peraturan perundang-undangan tertulis sehingga berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*Library Research*).<sup>1</sup>

## PEMBAHASAN

### Pentingnya Perizinan dalam Pembangunan Vila

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu :

- a) Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
- b) Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.
- c) Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di

dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut.

Adapun faktor yang dimaksudkan adalah :

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana;
- d. Faktor kebudayaan;
- e. Faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mempunyai suatu pemahaman kritis bahwa dalam hal peningkatan terhadap pelayanan pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di kota Yogyakarta tidak akan terlepas dari konsep penegakan hukum.

Pengakan hukum itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi seberapa besar peranan masyarakat terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Apabila keperdulian masyarakat terhadap lingkungannya meningkat, maka peran serta dari berbagai pihak akan menunjang secara runtut tentang pelaksanaan terhadap

---

<sup>1</sup> Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*.

ketentuan yang telah ditetapkan. Pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab bagi pelaku usaha industri agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal ini sangat diperlukan agar pada semua lapisan masyarakat mempunyai peran demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup. Faktor yang ada selain itu merupakan suatu dukungan terhadap faktor penting yang sebelumnya telah melekat pada kebiasaan ataupun budaya yang selama ini dijalankan dalam lingkungan hidup bermasyarakat.

### KESIMPULAN

Adapun faktor yang menyebabkan pentingnya perizinan dalam Pembangunan villa dimaksudkan adalah :

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana;
- d. Faktor kebudayaan;
- e. Faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan Ke). Raja Grafindo Persada.
- Sukradana, Ariana, I. N. J., & Sari, N. P. R. (2018). Dampak keberadaan villa bagi masyarakat di Banjar Canggu Kuta Bali. *Jurnal*

- Kepariwisataan Dan Hospitalitas*, 2(1), 42–60.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika.
- I Nyoman Wardi, M. S. (2017). ea9682f48f0b5fb65f9acde696d7ae57.pdf. Stupika Journal of Archaeology and Culture, 1. <http://erepo.unud.ac.id/eprint/20839/1/ea9682f48f0b5fb65f9acde696d7ae57.pdf> Grotto Spa. (2020). Tigh-Na-Mara on-site Grotto Spa. <https://grottospa.com/> I Design Arch. (2020). La Dimora di Metello: A Historic Cave Hotel in Southern Italy. <https://www.idesignarch.com/la-dimora-di-metello-a-historic-cave-hotel-in-southern-italy/>
- Jaya, K. P. (2019). Peran Arsitek Dalam Meraih Tri Hita Karana Tourism Awards Pada Rancangan the Ulin Villa & Spa Di Seminyak-Bali. *Jurnal Patra*, 1(2), 68–73. <https://doi.org/10.35886/patra.v1i2.23>
- Yudasuara, I. K. (2015). Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 2, 132–149. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2015.v02.i01.p08>